

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022**

## **DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**



## **KABUPATEN TANAH LAUT**

## **TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjat Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas selesainya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD, LKPD Kepala Daerah. Hal ini berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dan ringkasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RLPPD). Setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik (Good Governance) tersebut di atas, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan sistematika penulisan LKPJ sesuai dengan tugas dan fungsi urusan yang telah dilaksanakannya.

Kami berharap semoga laporan pertanggungjawaban yang kami buat ini dapat memberikan manfaat, terkait dengan ketersediaan sumber-sumber data yang kami peroleh dari beberapa bidang dan sekretariat sesuai sistematika penulisan yang berlaku. Data-data yang kami sajikan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan pada akhir tahun anggaran 2022.

Demikian laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut yang kami buat, mohon kiranya saran dan arahan yang konstruktif demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Dinas



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum .....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	1
1.3 Data Umum Daerah.....	2
1. Data Geografis Wilayah.....	3
2. Jumlah PNS.....	3
3. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	5
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	 7
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEKWENANGAN DAERAH.....	 10
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	10
1. Capaian Kinerja Program.....	10
2. Capaian Kinerja Keluaran.....	16
3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja.....	 21
 BAB IV PENUTUP.....	 24
4.1 Kesimpulan.....	24
4.2. Saran.....	25

## **BAB I . PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan.

### **1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Sasaran RPJMD tahun 2018 s/d 2023 merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan dalam kurun waktu satu tahun dengan menyelaraskan rencana strategis dari pencapaian Misi RPJMD tersebut.

Misi merupakan program dan rencana kerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 s/d 2023. Adapun Visi RPJMD Tahun 2018 s/d 2023 Bupati dan Wakil Bupati adalah “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi “ (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) Sedangkan Misi ada 5 (lima) yang harus diemban untuk dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industry kreatif
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance)
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas regiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat dan
5. Membangunan sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan program kerja yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sesuai rencana strategis yang diturunkan dalam bentuk rencana kerja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam rangka pencapaian sasaran Misi dari RPJMD tahun 2018 s/d 2023 yaitu Misi ke 5 (lima). “Membangunan sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

### **1.3 Data Umum Daerah**

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

## **1. Data Geografis Wilayah**

Secara letak geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara 114°30'20" BT – 115°23'31" BT dan 3°30'33" LS - 4°11'38" LS. Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km<sup>2</sup> (SK. Gubernur) atau hanya 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Tanah Laut terdiri atas 11 kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Takisung, Batu Ampar, Panyipatan, Jorong, Kintap, Tambang Ulang, Bati-Bati, Kurau dan Bumi Makmur serta, 135 desa dan kelurahan yang tersebar didalam Kabupaten Tanah Laut. Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa

luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km<sup>2</sup>.

## **2. Jumlah PNS**

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut mempunyai aparatur/ pegawai/ tenaga fungsional pegawai tidak tetap dengan latar belakang pendidikan dan tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di 11 kecamatan di

Kabupaten Tanah Laut dengan nama kantor masing-masing Kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian BPP, untuk mengetahui jumlah pegawai tahun 2022 tersebut akan disajikan daftar table sebagai berikut :

**Tabel 1. Berdasarkan Pendidikan**

PENDIDIKAN	JUMLAH		
	ASN	P3K	PTT
S2	1	-	-
S1	94	14	15
DIII	8	1	8
SLTA	14	1	22
SMP	-	-	3
SD	1		1
Jumlah	118	16	49

**Tabel 2. Berdasarkan Golongan**

Golongan	ASN
I	1
II	5
III	81
IV	31
Jumlah	118



**Tabel 3. Berdasarkan Eselon**

ESELON II	ESELON III	ESELON IV
1	5	3

### **3. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Realisasi belanja Daerah yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berupa belanja yang terbagi atas :

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal

Adapun realisasi Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2022 dibanding dengan realisasi belanja tahun 2021 akan terlihat tingkat realisasi kenaikan dan penurunan pada tabel dibawah ini :

**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021	PERSENTASE KENAIKAN DAN PENURUNAN
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>42.763.638.991</b>	<b>39.256.391.620,00</b>	<b>91,80</b>	<b>32.295.747.284,00</b>	<b>121,5528202</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>32.124.956.282</b>	<b>29.352.317.068,00</b>	<b>91,37</b>	<b>25.425.123.061,00</b>	<b>115,446116</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	23.920.647.200	21.686.446.680,00	90,66	19.128.799.496,00	<b>113,370 6623</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.033.488.142	3.801.056.388,00	94,24	6.091.567.365,00	<b>62,39865966</b>
5.1.05	Belanja Hibah	4.170.820.940	3.864.814.000,00	92,66	204.756.200,00	<b>1887,51989</b>
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>32.124.956.282</b>	<b>29.352.317.068,00</b>	<b>91,37</b>	<b>25.425.123.061,00</b>	<b>115,446116</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.638.682.709</b>	<b>9.904.074.552,00</b>	<b>93,09</b>	<b>6.870.624.223,00</b>	<b>144,151015</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.758.981	119.776.800,00	86,32	1.026.525.223,00	<b>11,66817895</b>
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.260.545.452	1.194.199.752,00	94,74	1.014.047.000,00	<b>117,7657201</b>
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.239.378.276	8.590.098.000,00	92,97	4.830.052.000,00	<b>177,8469052</b>
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>10.638.682.709</b>	<b>9.904.074.552,00</b>	<b>93,09</b>	<b>6.870.624.223,00</b>	<b>144,151015</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>42.763.638.991</b>	<b>39.256.391.620,00</b>	<b>91,80</b>	<b>32.295.747.284,00</b>	<b>121,5528202</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 42.763.638.991 )</b>	<b>( 39.256.391.620,00 )</b>	<b>91,80</b>	<b>( 32.295.747.284,00 )</b>	<b>121,5528202</b>

## **BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Adapun kegiatan yang telah mengalami perubahan tahun anggaran 2022 terkait dengan pelaksanaan pengelolaan belanja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut t telah ditetapkan mengingat pada saat itu untuk pencapaian target kinerja pada akhir tahun belum terpeenuhi secara maksimal mengingat masih adanya kegiatan yang harus diadakan perubahan penambahan pagu kegiatan sampai dengan akhir tahun berupa kegiatan :

### **1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**

Penyediaan dan peralatan dan perlengkapan kantor ini dilakukan perubahan pagu sebesar Rp, 122.752.757 menjadi sebesar Rp. 133.900.507 atau mengalami penambahan pagu sebesar Rp. 11.148.750.- Mengingat perlunya pengadaan baliho dan papan pengumuman untuk memblikasikan aktivitas kegiatan dibidang pertanian dan momen-momen penting lainnya yang harus terinformasikan bagi aparatur atau karyawan Dinas sendiri maupun yang berada pada kantor Balai Penyuluhan Pertanian yang berada pada sebelas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini penting untuk memberikan informasi atau anjuran bagi kepentingan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

### **2. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**

Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ini dilakukan perubahan pagu dari Rp. 155.000.000,- menjadi sebesar Rp. 200.990.000,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 45.990.000,- .

Mengingat ketersediaan perjalanan dinas tidak mencukupi yang mana pada bulan agustus sudah tidak mencukupi untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah sedangkan tuntutan pelaksanaan rapat-rapat, pertemuan, monitoring, undangan dari Kementan Republik Indonesia, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan lain-lain perlu untuk dihadiri.

### 3. Penyediaan Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik ini dilakukan perubahan sebesar dari Rp. 218.839.034,- menjadi sebesar 248.435.392,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 29.596.358,- Mengingat ketersediaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sampai dengan akhir tahun tidak terpenuhi keberadaannya oleh karena itu untuk dilakukan usulan perubahan dilakukan dalam pencapaian target untuk jasa komunikasi tersebut pada akhir tahun anggaran

### 4. Pendampingan penggunaan sarana pertanian

Pendampingan penggunaan sarana pertanian dilakukan perubahan sebesar dari Rp. 179.945.716,- menjadi sebesar Rp. 251.081.815,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 71.136.099,- . Mengingat kajian penyusunan peraturan daerah LP2B sudah mulai disusun oleh pihak ketiga sehingga untuk memenuhi pelaksanaan tersebut perlu untuk di sosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada para petani tentang keberadaan LP2B dengan harapan untuk dapat memahami dan mengerti tentang keberadaan

LP2B mengingat keberadaan ini sangat penting mengenai keberadaan lahan-lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut untuk tetap lestari keberadaannya.

Pelaksanaan penyusunan LP2B untuk kabupaten Tanah Laut khususnya merupakan amanah regulasi yang harus dilaksanakan mengingat ketersediaan luasan lahan pertanian semakin mengurangi keberadaannya terutama untuk tanaman komoditas padi. Sekarang banyak lahan persawahan khususnya untuk pertanian alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat para petani untuk dijadikan pengembangan komoditas hortikultura dan perkebunan.

### **BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022

##### **1. 1 Perjanjian Kinerja Eselon II**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Thn 2022 (ton)	Realisasi Thn 2022 (ton)	Persentase
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Produksi hasil tanaman pangan pangan hortikultura dan perkebunan 1. Padi 2. Jagung 3. Cabe 4. Bawang Merah 5. Karet 6. Kelapa Sawit	150.000 120.000 1.698 81,8 13.500 46.000	131.058 122.835 2.350,90 8,03 14.601,70 50.865,70	87,372 102,36 138,45 9,81 108,16 110,58
2	Optimalnya Pemasaran Produksi Pertanian	Persentase Produksi hasil pertanian yang dipasarkan	100 %	100 %	100%
3	Optimalnya Mutu hasil Perkebunan	Persentase Komoditas unggulan perkebunan yang diterima perusahaan pengolahan : 1. Kelapa sawit 2. Karet	100 % 100 %	100% 100%	100% 100%
4	Meningkatnya Pemanfaatan sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai standar	100 %	100%	100%

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 26.017.031.032
2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 1.330.352.697
3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp. 13.768.273.893

4	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp. 154.509.542
5	Program perizinan usaha pertanian	Rp. 16.721.679
6	Program Penyuluh Pertanian	Rp. 1.476.750.148

## 1.2 Perjanjian Kinerja Eselon III (Kabid Tanaman Pangan)

No	Kinerja Utama	Indikator	Target Thn 2022 (Ha)	Realisasi Thn 2022 (Ha)	Persentase
1	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Persentase luas tanam tanaman pangan : Padi Jagung	36.639 20.740	36.360 20.740	99,24 100%
		Persentase luas panen tanaman pangan : Padi Jagung	28.882 20.014	28.882 20.014	100% 100%
2	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Persentase produksi hasil tanaman pangan yang dipasarkan Padi Jagung	90% 100%	90% 100%	100% 100%
3	Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Pangan	Persentase teknologi tepat guna yang diterapkan Padi Jagung	100%	100%	100%

No	Program/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	Rp. 9.900.000
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 124.952.145

### 1.3 Perjanjian Kinerja Eselon III (Kabid Hortikultura)

No	Kinerja Utama	Indikator	Target Thn 2022 (ha)	Realisasi Thn 2022 (ha)	Persentase
1	Meningkatnya Luasan Tanaman Hortikultura	Persentase luas tanam tanaman hortikultura Cabe Bawang Merah Tanaman Anggrek Semangka	180 4 1 80	199,5 4 1 86,25	110,83 100% 100% 107,81
		Persentase luas panen tanaman hortikultura Cabe Bawang Merah Semangka	250 2,0 90	256,25 2,0 93,75	102,5 100% 104,17
2	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Persentase produksi hasil tanaman hortikultura yang dipasarkan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengembangan Tanaman Hias	Persentase tanaman hias yang dikembangkan	1 Tanaman (100%)	100%	100%

No	Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 8.457.534
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 279.299.018



### 1.3 Perjanjian Kinerja Eselon III (Kabid Perkebunan)

No	Kinerja Utama	Indikator	Target Thn 2022 (Ton)	Realisasi Thn. 2022 (Ton)	Persentase
1	Meningkatnya Luasan Areal tanaman Perkebunan	Persentase luas tanam tanaman Perkebunan : Karet Sawit Kopi	15.900 12.500 140	16.015 12.634 144	100,72 101,07 102,86
2	Meningkatnya Produksi Komoditas unggulan Perkebunan	Persentase Produksi hasil tanaman perkebunan yang dipasarkan : Karet Sawit Kopi	100 % 100 % 100 %	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3	Meningkatnya Pemasaran hasil tanaman perkebunan	Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan: Karet Sawit Kopi	100% 100% 100%		

No	Program Kegiatan	Anggaran
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian : - Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Rp. 33.299.720
2	Pengendalian dan pengendalian bencana pertanian	Rp. 9.999.863
3	Program perizinan usaha pertanian - penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten/kota	

### 1.4 Perjanjian Kinerja Eselon III (Kabid PSP dan Penyuluhan)

No	Kinerja Utama	Indikator	Target Thn 2022	Realisasi Thn 2022	Persentase
1	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM penyuluh yang bersertifikat profesi	12,5%	-	0
		Persentase kelompok tani yang terampil	1.700 Kelompok (100%)	1.700	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase alsintan yang dapat dimanfaatkan	175 Buah (100%)	175	100
		Persentase kelompok tani yang memanfaatkan pupuk bersubsidi	15.000 (100%)	15.000	100%
		Persentase jalan usaha tani yang dapat dimanfaatkan	46 Unit (100%)	46 unit	100%
		Persentase jalan produksi yang dapat	24 Unit (100%)	24 unit	100%

		dimanfaatkan			
3	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani a. Pemula-Lanjut b. Lanjut-Madya	5% 0,5%	5% 0,5	100% 100%

No	Program kegiatan	Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp.13.768.273.893
2	Program Penyuluh Pertanian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian Penyuluh Pertanian	Rp. 78.100.000
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan balai Penyuluhan di Kecamatan Serta Sarana Pendukung	Rp. 1.399.215.524
4	Program Perizinan Usaha Pertanian Kegiatan Penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub.Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Rp. 16.721.679

### 1.5 Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No	Kinerja Utama	Indikator	Target Thn 2022	Realisasi Thn 2022	Persentase
1	Meningkatkan Penerapan tata kelola ke Pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai RB	B	--	0
2	Meningkatnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Nilai SAKIP	B	-	0
3	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantot	Persentase terkelolanya administrasi umum kepegawaian yang baik dan tepat waktu	100 %	100%	100%
		Persentase terkelolanya administrasi perencanaan yang baik dan tepat waktu	100%	100%	100%

		Persentase terkelolanya administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan	100%	100%	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.017.031.032

## 2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
					Fisik		Keuangan			
					Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11
3.27	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN			42.763.638.991			38.909.789.770		3.853.849.221	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.017.031.032			23.603.743.216		2.413.287.816	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.440.000			11.439.800		200	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen	6 Dokumen	8.000.000	6 Dokumen	100,00	7.999.800	100,00	200	1. DPA, 2. DPA Perubahan, 3. Renja, 4. Renstra, 5. RKA, 6. Laporan
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan	6 Dokumen	3.440.000	6 Dokumen	100,00	3.440.000	100,00	-	1. RB, 2. IKM, 3. LAKIP, 4. LKP, 5. LPPD, 6. Laporan
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.924.087.200			21.689.886.480		2.234.200.720	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji daan tunjangan ASN	12 Bulan	23.920.647.200	12 Bulan	100,00	21.686.446.680	90,66	2.234.200.520	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan	24 Laporan	3.440.000	24 Laporan	100,00	3.439.800	99,99	200	12 Laporan Gaji, 12 laporan TPP
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0			0		-	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah orang	30 orang	0			0		-	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			430.902.977			348.946.835	388	81.956.142	

3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis	6 jenis	13.205.864	6 Jenis	100,00	11.633.314	88,09	1.572.550	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis jumlah unit	17 jenis 60 unit	143.895.207	17 jenis 60 unit	60,00	83.277.700	57,87	60.617.507	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis	6 Jenis	49.349.506	6 Jenis	100,00	37.496.900	75,98	11.852.606	1. Baliho, 2. Banner, 3. Cetak, 4. Fotocopy, 5. Spanduk
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis	4 Jenis	23.462.400	4 Jenis	100,00	15.620.000	66,57	7.842.400	1. Jurnal, 2. Surat Kabar, 3. Majalah, 4. Tabloid
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perdin	15 kali 34 8	200.990.000	15347 Kali	99,99	200.918.921	99,96	71.079	12 Bulan
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1.461.000.855			1.363.952.660		97.048.195	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis	4 jenis	248.435.392	4 Jenis (12 Bulan)	100,00	158.896.288	63,96	89.539.104	1. Telpn, 2. Air, 3. Listrik, 4. Internet
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ptt	12 bulan	1.212.565.463	12 Bulan	100,00	1.205.056.372	99,38	7.509.091	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			189.600.000			189.517.441		82.559	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang dipelihara	1 unit	25.000.000	1 Unit (12 Bulan)	100,00	24.984.900	99,94	15.100	(12 Bulan) Kendaraan Jabatan Kadistan
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4	10 unit 7	145.000.000	107 Unit	100,00	144.991.541	99,99	8.459	Kendaraan Operasional Dinas
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis	10 Jenis	19.600.000	10 Jenis	100,00	19.541.000	99,70	59.000	(12 Bulan) Kendaraan Jabatan Kadistan
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung dan jumlah jenis	2 gedung 4 jenis	0					-	

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.330.352.697			967.676.802		362.675.895	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.330.352.697			967.676.802		362.675.895	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengadaan Combine Harvester	2 Unit	900.000.000	2 Unit	100,00	899.982.000	100,00	18.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pelatihan, Pertemuan, Sosialisasi, Workshop Jumlah Kegiatan NBOS , LP2B	37 Kali	430.352.697	37 Kali	100,00	414.296.652	96,27	16.056.045	1. Bidang TP 25 Kali 2. Bidang Bun 4 Kali 3. Bidang Horti 7 Kali 4. Kegiatan NBOS 1 Kali
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			13.768.273.893			12.812.852.000		955.421.893	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			13.768.273.893			12.812.852.000		955.421.893	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan produksi dan jalan usaha tani	46 unit 24 unit	13.768.273.893	46 unit 24 unit	100,00	12.812.852.000	93,06	955.421.893	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			154.509.542			133.855.500		20.654.042	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			154.509.542			133.855.500		20.654.042	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah pertemuan	42 kali	154.509.542	42 Kali	100,00	133.855.500	86,63	20.654.042	1. Bidang TP 2. Bidang Bun 3. Bidang Horti
		Jumlah Pengadaan	1 Paket		1 Paket					4. Pengadaan Paket Obat-obatan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			16.721.679			16.594.000		127.679	

<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>16.721.679</b>			<b>16.594.000</b>		<b>127.679</b>	
3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	jumlah berkas dan Sop	34 0 berkas (1 sop)	<b>16.721.679</b>	340 berkas	100,00	16.594.000	99,24	<b>127.679</b>	Rekomendasi Pinjam Pakai Alat
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			<b>1.476.750.148</b>			<b>1.375.068.252</b>		<b>101.681.896</b>	
<b>3.27.07..2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>			<b>1.476.750.148</b>			<b>1.375.068.252</b>		<b>101.681.896</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	jumlah BPP	11 unit	<b>77.916.301</b>	11 Unit	100,00	61.678.500	79,16	<b>16.237.801</b>	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian	jumlah BPP	3 unit	<b>1.398.833.847</b>	3 Unit	100,00	1.313.389.752	93,89	<b>85.444.095</b>	Pembangunan dan Renovasi Pembangunan BPP dan Sarana Keinformasian BPP

Kegiatan tahun 2022 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan program sebanyak 6 (enam) program dengan kegiatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan Jumlah pagu sebesar Rp. 42.763.638.991,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.356.391.620 atau 91,80 % realisasi keuangan telah dicapai dalam rangka mewujudkan program kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022.

Dalam pencapaian target kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang ada semua dapat terealisasi dengan baik tepat waktu dan sasaran, sehingga target indikator dapat terpenuhi pada akhir tahun anggaran dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan.

Terkait permasalahan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, kegiatan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan Kepala Dinas dengan capaian target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tidak ada hal ini dapat diwujudkan pencapaian target kinerja keuangan sebesar 91,80 dengan target fisik sebesar 98,00 %



### 3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Kinerja Program.

#### 3.1.3. Pelaksanana Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1									
	Bidang Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung kedaulatan pangan di Indonesia	<p>Program : pemyediaan dan pengembangan sarana pertanian</p> <p>Kegiatan : Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian</p> <p>( Produksi hasil tanaman pangan pangan hortikultura dan perkebunan )</p> <p>1.Padi 2.Bawang Merah</p>	150.000 81,8	131.058 8,03	<p><b>Permasalahan Pada Padi :</b></p> <p>1. Luas baku sawah (LBS) untuk tanaman padi mengalami penurunan kurang lebih 50 % dari luasan 65.000 ha</p> <p>2. Banyaknya alih pungsi lahan dari pertanian sawah untuk dijadikan lahan pengembangan</p>	<p><b>Upaya mengatasi pada padi</b></p> <p>1. Meningkatkan mutu indeks pertamanan untuk padi</p> <p>2. Mensosialisasika n tentang LP2B kepada para petani mengenai manfaat LP2B</p>	-

						<p>horti , kelapa sawit dll</p> <p>3. Adanya serangan hama penyakit tanaman padi</p>	<p>3. Melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman</p>	
						<p><b>Pada Bawang Merah :</b></p> <p>1. Petani bawang merah masih terlalu berharap bantuan dari Kementan Republik Indonesia mengenai benih bawang merah</p> <p>2. Budidaya bawang merah punya</p>	<p><b>Pada Bawang Merah</b></p> <p>1. Perlunya kemandirian swadaya dari para petani bawang merah</p> <p>2. Melakukan perawatan dan pola tanam yang</p>	

							perlakuan khusus untuk pemeliharaanya	lebih intensif	
							3. Lebih rentan terhadap serangan hama penyakit tanaman	3. Melakukan pengendalian secara intensif terhadap serangan hama penyakit	
							4. Para petani bawang merah umumnya orang yang sudah punya pengalaman dari pulau jawa	4. Melakukan proses pembelajaran dan tukar pengalaman kepada petani yang sudah profesioanl yang difasiltasi oleh penyuluh pertanian	

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah dalam melaksanakan tugas pencapaian target kinerja indicator produksi pada bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, ada dua Komoditas tanaman yang belum mencapai target dan realisasi yang diharapkan yaitu pada komoditas padi dan bawang merah. Sedangkan pada komoditas lainnya berupa Jagung, kedelai, cabe, karet dan kelapa sawit telah melebihi target produksi dan realisasi yang ada, hal ini merupakan wujud kerja keras Pimpinan dan aparatur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam mendukung pengembangan produk unggulan di daerah Kabupaten Tanah Laut

Sedangkan pelaksanaan target kinerja program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan capaian kinerja keuangan dari Jumlah pagu sebesar Rp. 42.763.638.991,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.356.391.620 atau 91,80 % dari target kinerja yang diharapkan. Hal ini dapat diwujudkan mengingat adanya sinergitas, saling kerja sama yang baik para aparatur pada lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk dapat memaksimalkan target kinerja out put dan outcome yang diharapkan.

## 4.2 Saran Tindak

Untuk dapat mencapai target kinerja produksi yang maksimal dari berapa komoditas yang ada maka diperlukan adanya komitmen bersama para pengambil kebijakan dalam hal ini Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, para aparatur / pegawai dan para penyuluh pertanian dilapangan serta didukung adanya sumber pendanaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, mengingat pencapaian target produksi merupakan indikator tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang harus dipenuhi dalam setiap tahun sesuai Rencana Strategis.

Untuk dapat mewujudkan target kinerja out put dan out come dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian target kinerja keuangan dan fisik yang tinggi ini, maka diperlukan adanya komitmen dari pimpinan dengan para unsur pelaksana kegiatan untuk dapat mencapai target terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya.

Membuat rencana kerja program kerja dan kegiatan yang benar-benar terukur dalam pencapaian target kinerja, menyusun skala prioritas program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi kerja yang akan dilakukan dan berusaha untuk mewujudkan target indikator sesuai yang diharapkan.